

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Sebagai daerah otonom Kabupaten Badung berdasarkan jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Adapun penerima pelayanan dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu warga negara dengan ketentuan :

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar; dan
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Lebih lanjut standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.



4.1.2 Target Pencapaian

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	100%
2.	Pendidikan Dasar	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	100%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Badung, 2024

4.1.3 Realisasi

Tabel 4.2
Realisasi Capaian Urusan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian (%)
Pencapaian SPM							100.00%
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini						100.00
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	Jumlah yang Harus Dilayani		11800	11800	0	100.00%	
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						20.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1. Angka Partisipasi Sekolah	%	100	100	0	100.00%	
	2. Angka partisipasi murni	%	100	100	0	100.00%	
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	90.91	90.91	0	100.00%	
	4. Proposi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma wmpat(D-IV)	%	81.56	81.56	0	100.00%	
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0.8	0.8	0	100.00%	



	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	47	47	0	100.00%
	7. Indeks distribusi guru	%	0.22	0.22	0	100.00%
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	44.6	44.6	0	100.00%
	9. Proporsi PTK penggerak	%	0.36	0.36	0	100.00%
2.	Pendidikan Dasar					100.00%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	51919	51919	0	100.00%
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Total Pencapaian (%)
	SD					
	1. Angka Partisipasi Kasar	%	100	100	0	100.00 %
	2. Angka Partisipasi Sekolah	%	100	100	0	100.00 %
	3. Kemampuan literasi	Nilai	60.13	60.13	0	100.00%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	45.22	45.22	0	100.00%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	77.43	77.43	0	100.00%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	44.13	44.13	0	100.00%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	72.24	72.24	0	100.00%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	64.33	64.33	0	100.00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	64.33	64.33	0	100.00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	47	47	0	100.00%
	11. Indeks distribusi guru	%	0.36	0.36	0	100.00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	93	93	0	100.00%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	0.14	0.14	0	100.00%
	SMP					
	1. Angka Partisipasi Kasar	%	100	100	0	100.00 %
	2. Angka Partisipasi Sekolah	%	100	100	0	100.00 %





	3. Kemampuan literasi	Nilai	76.50	76.50	0	100.00 %
	4. Kemampuan Numerasi	Nilai	63.49	63.49	0	100.00 %
	5. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	81.01	81.01	0	100.00 %
	6. Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	58.19	58.19	0	100.00 %
	7. Indeks Iklim Keamanan	Nilai	72.09	72.09	0	100.00 %
	8. Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai	63.39	63.39	0	100.00 %
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	63.39	63.39	0	100.00 %
	10. Kecukupan Formasi guru ASN	%	50	50	0	100.00 %
	11. Indeks distribusi guru	%	0.32	0.32	0	100.00 %
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	91.9	91.9	0	100.00 %
	13. Proporsi PTK penggerak	%	0.38	0.38	0	100.00 %
3	Pendidikan Kesenjangan					100.00 %
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1176	1176	0	100.00%
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	100.00%
	1. Angka Partisipasi Kasar	%	100	100	0	100.00 %
	2. Angka Partisipasi Sekolah	%	100	100	0	100.00 %
	3. Kemampuan literasi	Nilai	41.98	41.98	0	100.00 %
	4. Kemampuan Numerasi	Nilai	41.04	41.04	0	100.00 %
	5. Perbedaan Skor Literasi	Nilai	69.37	69.37	0	100.00 %
	6. Perbedaan Skor Numerasi	Nilai	48.89	48.89	0	100.00 %
	7. Indeks Iklim Keamanan	Nilai	67.93	67.93	0	100.00 %
	8. Indeks Iklim Kebinekaan	Nilai	58.31	58.31	0	100.00 %
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	58.31	58.31	0	100.00 %



10. Kecukupan formasi guru ASN	%	47	47	0	100.00 %
11. Indeks distribusi guru	%	0.36	0.36	0	100.00 %
12. Proporsi PTK bersertifikat	%	93	93	0	100.00 %
13. Proporsi PTK penggerak	%	0.14	0.14	0	100.00 %

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, Tahun 2024

4.1.4 ALOKASI ANGGARAN

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

Pendanaan	Pagu
APBD Kab.Badung	12,093,607,564,292
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	1,595,309,224,607
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	760,412,673,610
APBD	760,412,673,610
a. APBD Murni	624,283,805,760
b. APBD DAU	13,290,677,850
c. APBD DAK Fisik	10,228,210,000
d. APBD DAK Non Fisik	112,609,980,000
e. Dana Bagi Hasil	0
f. Kerjasama	0
g. Otonomi Khusus	0
NON APBD	0
a. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	0
APBN	0
a. APBN-Dekonsentrasi	0
b. APBN-Tugas Pembantuan	0
Dana Lainnya	0
PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	47.67%

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, Tahun 2024

4.1.5 DUKUNGAN PERSONIL

Tabel 4.4
Dukungan Personil Pelaksanaan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	
		PNS	Non PNS
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	11	4
2.	Pendidikan Dasar		
	SD	12	23
	SMP	15	13
3.	Pendidikan Kesenjangan	2	-

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, 2024





4.1.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tabel 4.5
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

No	Permasalahan Penerapan SPM	Keterangan Masalah	Aksi
1.	Pengumpulan Data	Cukup sulitnya pengumpulan data karena sumber data pendukung berada di OPD lain sehingga pengumpulan data tidak tepat waktu	Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait
2.	Penghitungan Kebutuhan	Keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar sektor	Meningkatkan koordinasi antar sektor
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Perlunya koordinasi terkait pembiayaan antar program dan lintas sektor	Perlu melakukan pemetaan pembiayaan, karena terdapat sumber pembiayaan baik dana alokasi khusus dari pusat ke daerah, dana daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang dapat digunakan dalam penerapan SPM
4.	Pelaksanaan	Beberapa permasalahan di lapangan seperti kondisi lapangan, cuaca dan tenaga	Meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan
5.	Lain-Lain		

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Badung, 2024

4.1.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 4.6
Program dan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

No (1)	Program (2)	Kegiatan (3)	Sub Kegiatan (4)	Satuan (5)	Perencanaan (6)	Pelaksanaan (7)	Serapan (8)
	KAB.BADUNG				760,412,673,610	550,481,684,676	72.39 %
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				760,412,673,610	550,481,684,676	72.39 %
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			388,365,119,530	287,429,502,984	74.01 %
		1.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		2.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		3.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	159,614,000	143,434,094	89.86 %
		4.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	932,072,400	468,357,338	50.25 %
		5.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	196,992,401,532	124,249,834,282	63.07 %
		6.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		8.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		9.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%



PEMKAB.BADUNG

		10.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		11.	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	8,589,630,500	7,702,336,000	89.67 %
		12.	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		13.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	7,957,962,284	5,495,833,516	69.06 %
		14.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	11,360,463,156	2,888,944,801	25.43 %
		15.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	580,162,800	308,108,200	53.11 %
		16.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	700,000,000	89,150,000	12.74 %
		17.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	2,934,825,600	1,661,695,078	56.62 %
		18.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	56,192,368,264	56,192,368,2643	92.24 %
		19.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	1,086,689,100	973,322,900	89.57 %
		20.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	348,619,960	342,031,280	98.11 %
		21.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	71,888,343,560	70,270,968,907	97.75 %
		22.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	0	0	0%
		23.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	269,823,000	235,158,617	87.15 %
		24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	0	0	0%
		25.	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		26.	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	0	0	0%
		27.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		28.	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		29.	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		30.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	305,871,671	234,011,747	76.51 %
		31.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		32.	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		33.	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		34.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		35.	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		36.	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		37.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	17,408,294,800	16,105,234,500	92.51 %
		38.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		39.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	6,181,841,269	120,651,625	1.95 %
		40.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		41.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1,495,000	1,495,000	100.00 %
		42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	4,474,640,634	4,309,462,226	96.31 %
		JUMLAH INDIKATOR			388,365,119,530	287,429,502,984	74.01 %
	2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			309,966,186,024	220,310,547,130	71.08 %





PEMKAB. BADUNG

		1.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	159,933,623,610	110,586,144,179	69.15 %
		2.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		3.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		4.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		5.	Pembangunan Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		6.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		7.	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		8.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		9.	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		10.	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		11.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	28,622,824,159	16,688,535,543	58.30 %
		12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	5,521,678,700	734,255,762	13.30 %
		13.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		15.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		16.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
		18.	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
		19.	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
		20.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		21.	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	10,586,405,135	6,968,892,000	65.83 %
		22.	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		23.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	14,796,429,451	2,465,024,699	16.66 %
		24.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		25.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	298,253,200	294,196,000	98.64 %
		26.	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		27.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	956,925,000	139,150,000	14.54 %
		28.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1,054,621,800	536,234,396	50.85 %
		29.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	21,451,216,932	18,685,095,915	87.11 %
		30.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1,193,898,100	520,774,000	43.62 %
		31.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	166,130,684	158,973,180	95.69 %
		32.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	46,422,586,676	45,569,356,124	98.16 %
		33.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%





PEMKAB.BADUNG

		34.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	0	0	0%
		35.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	0	0	0%
		36.	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		37.	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		38.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		39.	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		40.	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		41.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	143,134,706	140,133,104	97.90 %
		42.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		43.	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		44.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		45.	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		46.	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		47.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	145,006,800	128,729,000	88.77 %
		48.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		49.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	894,596,200	174,704,000	19.53 %
		50.	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		51.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	17,778,854,871	16,520,349,228	92.92 %
		52.	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
		53.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				309,966,186,024	220,310,547,130	71.08 %
	3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			60,636,118,832	41,296,385,338	68.11 %
		1.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	24,828,321,978	19,892,654,511	80.12 %
		2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	170,528,000	146,909,199	86.15 %
		3.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0	0	0%
		4.	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	121,695,792	115,410,000	94.83 %
		5.	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	0	0	0%
		6.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	5,934,921,570	4,740,019,400	79.87 %
		7.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	1,092,177,566	1,007,434,100	92.24 %
		8.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	287,236,625	279,438,000	97.28 %





PEMKAB.BADUNG

		9.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	2,439,764,735	2,302,795,295	94.39 %
		10.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	987,337,398	987,337,398	100.00 %
		11.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	412,970,846	376,814,846	91.24 %
		12.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	118,047,950	65,649,700	55.61 %
		13.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	15,444,272,036	4,644,659,335	30.07 %
		14.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	105,461,583	105,461,583	100.00 %
		15.	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
		16.	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	0	0	0%
		17.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		18.	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		19.	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		20.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	150,794,230	150,794,230	100.00 %
		21.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		22.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	261,097,936	199,918,698	76.57 %
		23.	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		24.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	206,713,869	166,193,700	80.40 %
		25.	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		26.	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		27.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
		28.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		29.	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		30.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Buku	0	0	0%
		31.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		32.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
		33.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		34.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	7,030,277,832	5,293,972,739	75.30 %
		35.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1,044,498,886	820,922,604	78.59 %
		36.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		JUMLAH INDIKATOR			60,636,118,832	41,296,385,338	68.11 %
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1,445,249,224	1,445,249,224	100.00%





PEMKAB. BADUNG

		1.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		2.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	0	0	0%
		3.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	0	0	0%
		4.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		5.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		6.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	0	0	0%
		7.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	1,375,442,930	1,375,442,930	100.00%
		8.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		9.	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
		10.	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		11.	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		12.	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		13.	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		14.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		15.	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		16.	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
		17.	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
		18.	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
		19.	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
		20.	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
		21.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
		22.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		23.	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		24.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
		25.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		26.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
		27.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		28.	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		29.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%





		30.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		31.	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
		32.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	69,806,294	69,806,294	100.00%
		33.	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
		34.	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0%
		35.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
		36.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	0	0%
		JUMLAH INDIKATOR			1,445,249,224	1,445,249,224	100.00%
		JUMLAH PROGRAM			760,412,673,610	550,481,684,676	72.39 %

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, Tahun 2024

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan daerah Provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten/kota. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabet Mellitus
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia, yaitu *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).

Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas :

- Standar jumlah dan kualitas barang dan/jasa
- Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan
- Petunjuk Teknis atau cara pemenuhan Standar.

4.2.2 Target Pencapaian

Tabel 4.7
Target Pencapaian Indikator Pelayanan Kesehatan



No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100%
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100%

4.2.3 Realisasi

Tabel 4.8
Realisasi Capaian Urusan Kesehatan

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian (%)
Pencapaian SPM						99.00%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					99.98%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	8450	8450	0	100.00%
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.98%
	Jumlah Mutu Barang/ Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.91%
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	2440	2440	36	98.52%
	2 . Tablet tambah darah (180 table x jumlah ibu hamil)	Tablet	963609	963609	0	100.00 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	6293	6293	0	100.00 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	8450	8450	0	100.00 %



PEMKAB.BADUNG

5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	8450	8450	0	100.00 %
6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengdaan 15 % dari jumlah ibu hamil)	Paket	8450	8450	0	100.00 %
7 . Alat deteksi resiko ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hapatitis B dan Siflis dan HIV	Paket	8450	8450	0	100.00 %
8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Buku	8450	8450	0	100.00 %
9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	8450	8450	0	100.00 %
10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	7474	7474	0	100.00 %
11 . Gel USG (untuk puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	586	589	0	100.00 %
12. Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	227	227	0	100.00 %
13.Tenaga kesehatan:perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	642	642	0	100.00%
14.Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	569	569	0	100.00%
15.Tenaga kesehatan:Tenaga Kefarmasia	Orang	24	24	0	100.00%
16. Tenaga kesehatan:tenaga Gizi	Orang	24	24		
17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama priode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama,Dua	Orang	8450	8450	0	100.00%





PEMKAB. BADUNG

	kali pada trimester kedua,Tiga kali pada trimester ketiga)					
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100.00%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	8414	8414	0	100.00%
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM (20%)		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 . Formulir Partograf	Formulir	5270	5270	0	100.00%
	2 . Kartu ibu rekam medis ibu	Paket	5534	5534	0	100.00%
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	8414	8414	0	100.00 %
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	5812	5812	0	100.00 %
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	227	227	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	569	569	0	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	642	642	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	24	24	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	0	100.00%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					99.97%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%





PEMKAB. BADUNG

	Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	8109	8109	0	100.00%
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.97%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	99.83%
	1 . Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	7347	7290	57	99.22%
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	6591	6532	59	99.10%
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	4739	4739	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	7752	7693	59	100.00 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	7209	7209	0	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	8109	8109	0	100.00 %
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	2986	2986	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	227	227	0	100.00%
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	569	569	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	642	642	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	24	24	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	24	24	0	100.00%
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	0	100.00%
	14. Kader Kesehatan	Orang	2866	2866	0	100.00%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita					99.64%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	30961	30961	0	100.00%
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.64%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	98.22%
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)	Dokumen	22589	19919	2670	88.18%





PEMKAB. BADUNG

	atau instrumen standar lain yang berlaku					
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formuli	23399	20729	2670	88.59 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	9759	9750	0	100.00%
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	6666	6116	550	91.75%
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	27501	27151	350	98.73%
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	2956	2956	0	100.00 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	5073	4953	120	97.63%
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	3824	3822	2	99.95%
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	5310	5190	120	97.74%
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubella	Vaksin	3647	3647	0	100.00%
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	3056	3056	0	100.00%
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	2784	2784	0	100.00%
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	78548	78548	0	100.0
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	99	99	0	100.00 %
	15 Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	36	36	0	100.00 %
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang	277	277	0	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	569	569	0	100.00 %
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	642	642	0	100.00 %
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	0	100.00 %
	20 . Guru PAUD	Orang	626	626	0	100.00 %
	21. Kader Kesehatan	Orang	2888	2888	0	100.00%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					94.25%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total 74.53%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	90480	84288	6192	93.16%
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.73%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa	Jumlah Mutu Barang/Jasa	Jumlah Mutu Barang/Jasa	98.63%





			yang dibutuhkan	yang tersedia	yang belum tersedia	
1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku		90480	84288	6192	93.16%
2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku		90480	84288	6192	93.16%
3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen		90480	84288	6192	93.16%
4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir		370	370	0	100.00 %
5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir		62	62	0	100.00 %
6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet		25860	25860	0	100.00 %
7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb)	Alat		34	34	0	100.00 %





PEMKAB.BADUNG

	meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)					
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	8672	8672	0	100.00 %
	9 Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat	Paket	13	13	0	100.00 %
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara	Vaksin	30663	29382	1281	92.82%
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	13	13	0	100.00%
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	13	13	0	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	13	13	0	100.00%
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	13	13	0	100.00%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	13	13	0	100.00%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	13	13	0	100.00%
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	370	370	0	100.00&
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	370	370	0	100.00%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					95.32%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.93%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	340380	327316	13064	96.16%
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					18.39%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Mutu Barang/J	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa	91.96%





			asa yang dibutuhk an		yang belum tersedia	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	36	36	0	100.00 %
	2 Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	36	36	0	100.00 %
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	36	36	0	100.00 %
	4 . Alat : Glukometer	Unit	36	36	0	100.00 %
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	36	36	0	100.00 %
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	340380	327316	13064	96.16%
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	36	36	0	100.00 %
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	340380	327216	13064	96.16%
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	13	13	0	100.00 %
	10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	13	13	0	100.00 %
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	39	27	12	69.23%
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	105222	2404	102818	2.28 %
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	277	231	46	8339%
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	569	578	-9	100.00 %
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	642	653	-11	100.00 %
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	0	100.00 %
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	24	24	0	100.00%
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	0	0	0	100.00%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					99.99 %
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	65479	65479	0	100.00 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.99%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang/J asa yang dibutuhk an	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	99.95%





PEMKAB. BADUNG

	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	13	13	0	100.00 %
	2 Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	62	62	0	100.00 %
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	62	62	0	100.00 %
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	65479	65479	0	100.00 %
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	65479	65479	0	100.00 %
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	65479	65479	0	100.00 %
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	13	13	0	100.00 %
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	13	13	0	100.00 %
	9 .Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	13	13	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	13	13	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	13	13	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	13	13	0	100.00%
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	1510	1501	9	99.40%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					99.96%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.96%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	8699	8695	4	99.95%
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	100.00%
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	48	48	0	100.00 %





PEMKAB. BADUNG

	(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)					
	2 . Obat Hipertensi	Paket	8695	8695	0	100.00 %
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	24	24	0	100.00 %
	4 Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	1	1	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	36	36	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	231	231	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	578	578	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	653	653	0	100.00 %
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	0	100.00%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	24	24	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	24	24	0	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	24	24	0	100.00%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					99.77%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.77%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	3170	3098	9	99.71 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
	Jumlah Mutu Barang / jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang/J asa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	100.00%
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	3098	3098	0	100.00 %
	2 . otometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	36	36	0	100.00 %





	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	3098	3098	0	100.00%
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	1	1	0	100.00%
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	55	55	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	231	231	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	578	578	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	653	653	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	24	24	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	24	24	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	24	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	24	24	0	100.00 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100.00%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	687	687	0	100.00 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang/J asa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	100.00%
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis	Buku	39	39	0	100.00 %



PEMKAB. BADUNG

	Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)					
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenus	5	5	0	100.00%
	3 enyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	1	1	0	100.00 %
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	1	1	0	100.00 %
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	13	13	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	13	13	0	100.00%
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	13	13	0	100.00 %
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	13	13	0	100.00%
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang	13	13	0	100.00%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					99.31%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	4239	4239	0	100.00 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.31%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang/J asa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	96.54%
	1 Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	4239	4239	0	100.00%
	2 . Reagen Zn TB	Kit	104	50	54	48.08%
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	1000	1000	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis	Paket	4239	4239	0	100.00 %





PEMKAB. BADUNG

	Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering					
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	4239	4239	0	100.00%
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	26	26	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	2	2	0	100.00 %
	8 . Tuberkulin	Vial	200	200	0	100.00 %
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	26	26	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	26	26	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	24	24	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	13	13	0	100.00 %
	13 Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM).	Orang	26	26	0	100.00 %
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	11	11	0	100.00%
	15. Kader Kesehatan	Orang	14	14	0	100.00%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					99.86%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	13624	13624	0	100.00 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					19.86%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	99.30%
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	13624	13624	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Teks	13624	13624	0	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	13624	13624	0	100.00 %
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas	Paket	13624	13624	0	100.00 %





	pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK					
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	36	36	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	28	28	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	34	34	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	43	43	3	92.02 %
	9 . Tenaga kesehatan :Tenaga Kesehatan masyarakat	Orang	13	13	0	100.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	107	107	0	100.00 %

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, Tahun 2024

4.2.4 ALOKASI ANGGARAN

Tabel 4.9
Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

Pendanaan	Pagu
APBD Kab.Badung	12,093,607,564,292
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	921,139,210,676
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	10,214,108,277
APBD	10,214,108,277
h. APBD Murni	7,788,072,277
i. APBD DAU	0
j. APBD DAK Fisik	689,986,000
k. APBD DAK Non Fisik	1,736,050,000
l. Dana Bagi Hasil	0
m. Kerjasama	0
n. Otonomi Khusus	0
NON APBD	0
13. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
APBN	0
c. APBN-Dekonsentrasi	0
d. APBN-Tugas Pembantuan	0
Dana Lainnya	0
PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	1.11%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, 2024

4.1.5 DUKUNGAN PERSONIL



Tabel 4.10

Dukungan Personil Urusan Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	
		PNS	Non PNS
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	436	666
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	436	666
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	440	3550
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	410	4155
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	444	1416
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	410	641
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	418	2161
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	448	694
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	449	699
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	21	8
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	447	728
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	109	210

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, 2024

4.1.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tabel 4.11

Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan

NO	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM	KETERANGAN MASALAH	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Kesulitan pada saat melakukan pemetaan target. Hal ini disebabkan karena sasaran melakukan mobilitas tinggi, terutama pada populasi kunci - Penetapan target ibu hamil dengan menggunakan data Pusdatin, dimana target tersebut dinilai cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pertemuan koordinasi dengan Lintas Sektor dna melakukan pemetaan dengan melibatkan KPA dan LSM - Melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait penetapan target
2.	Penghitungan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> - SDM→ kekurangan tenaga terutama tenaga ATLM. Antara lain puskesmas abianseml IV tidak memiliki tenaga ATLM, dan beberapa puskesmas memiliki tenaga ATLM sebanyak 1 orang, sehingga menyulitkan ketika 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan kebutuhan tenaga ATLM di Puskesmas - Mengusulkan pengadaan Bahan Habis Pakai di APBD II tahun 2024



		<p>mengadakan kegiatan pemeriksaan luar gedung</p> <ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan jumlah Bahan habis pakai untuk pengadaan pemeriksaan HIV dan IMS- Mendiskusikan kepada pimpinan terkait kendala sarana dan prasarana yang ditemukan.	
3.	Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none">- Belum maksimalnya Perencanaan untuk Penghitungan Kebutuhan dan besaran anggaran karena belum di dukung oleh data Sasaran yang akurat	<ul style="list-style-type: none">- Akan meninjau Kembali pendataan sasaran yang akan dipergunakan sebagai sasaran SPM.
4.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">- Masyarakat masih menolak untuk melakukan pemeriksaan HIV	Melakukan koordinasi dengan KPA dan Puskesmas untuk mengadakan sosialisasi ke masyarakat
5.	Lain-Lain	<ul style="list-style-type: none">- Sistem pencatatan dan pelaporan dengan menggunakan aplikasi baru yaitu SIHA 2.1	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali terkait kendala yang dihadapi oleh layanan

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, 2024

4.2.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 4.12
Program dan Kegiatan SPM Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAB.BADUNG				10,214,108,277	8,919,065,157	87.32 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				10,214,108,277	8,919,065,157	87.32 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10,214,108,277	8,919,065,157	87.32 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	803,046,220	638,931,465	79.56 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	319,943,420	248,327,555	77.62 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	560,965,420	376,505,570	67.12 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	340,253,900	332,482,710	97.72 %
		5	Pengelolaan pelayanan	Orang	543,052,400	514,141,480	94.68 %



			kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	1,101,484,695	726,684,815	65.97 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	1,129,243,800	1,114,933,020	98.73 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	28,320,240	27,757,040	98.01 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	1,435,228,980	1,367,453,232	95.28 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	67,118,020	66,358,020	98.87 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1,514,143,691	1,486,811,691	98.19 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	2,371,307,491	2,018,678,559	85.13 %
	JUMLAH INDIKATOR				10,214,108,277	8,919,065,157	87.32 %
	JUMLAH PROGRAM				10,214,108,277	8,919,065,157	87.32 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, 2024

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah. Jenis pelayanan dasar pada bidang Pekerjaan Umum terdiri atas 2 (dua) jenis pelayanan dasar antara lain :

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari
adalah penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi , cuci, peturasan dan ibadah.
- b. Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik
adalah penyediaan rangkaian layanan pengolahan air limbah domestic yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.

Mutu Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- 1. Mutu Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau jasa.



2. Mutu Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Pengolahan air Limbah meliputi
- a. Kuantitas
- Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik
- b. Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik
- Kualitas pelayanan minimal air limbah domestic melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
 - Kualitas pelayanan minimal air limbah domestic melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

4.3.2 Target Pencapaian

Tabel 4.13
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	100%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Badung, 2024

4.3.3 Realisasi

Tabel 4.14
Realisasi Capaian Urusan Pekerjaan Umum

No .	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian (%)
	Pencapaian SPM					100.00%
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1140	1140	0	100.00 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%





PEMKAB.BADUNG

	1 . Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	285	285	0	100.00 %
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah tangga	285	285	0	100.00%
	3 . Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	285	285	0	100.00 %
	4 . Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	285	285	0	100.00%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	1316	1316	0	100.00 %





B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM %		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	329	329	0	100.00%
	2 . Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-	Rumah Tangga	329	329	0	100.00 %
	3 . Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	144341	0	144341	100.00%

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, Tahun 2024



4.3.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

Pendanaan	Pagu
APBD Kab.Badung	12,093,607,564,292
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	2,370,858,360,104
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	22,781,866,000
APBD	22,781,866,000
o. APBD Murni	22,781,866,000
p. APBD DAU	0
q. APBD DAK Fisik	0
r. APBD DAK Non Fisik	0
s. Dana Bagi Hasil	0
t. Kerjasama	0
u. Otonomi Khusus	0
NON APBD	0
<i>14. Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	0
APBN	0
e. APBN-Dekonsentrasi	0
f. APBN-Tugas Pembantuan	0
Dana Lainnya	0
PERSENTASE ANGGRAN SPM TERHADAP ANGGRAN OPD	0,96%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Badung, 2024

4.3.5 Dukungan Personil

Tabel 4.16
Dukungan Personil Pelaksanaan Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	
		PNS	Non PNS
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	6	4
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	6	4

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Badung, 2024

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.17
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Permasalahan Penerapan SPM	Keterangan Masalah	Aksi
1.	Pengumpulan Data	Cukup sulitnya pengumpulan data karena sumber data berada di OPD lain sehingga harus menunggu untuk pengumpulan data	Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait





2.	Penghitungan Kebutuhan	Keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar sektor	Meningkatkan koordinasi antar sektor
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Perlunya koordinasi terkait pembiayaan antar program dan lintas sektor	Perlu melakukan pemetaan pembiayaan, karena terdapat sumber pembiayaan baik dana alokasi khusus dari pusat ke daerah, dana daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang dapat digunakan dalam penerapan SPM
4.	Pelaksanaan	Beberapa permasalahan di lapangan seperti kondisi lapangan, cuaca dan tenaga	Meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan di lapangan
5.	Lain-Lain	-	-

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Badung, 2024

4.3.7 Program dan Kegiatan

Tabel 4.18
Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	Perencanaan	Pelaksanaan	Serapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAB. BADUNG				22,781,866,000	18,231,834,165	80.03 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				9,790,311,000	7,050,977,227	72.02 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			9,790,311,000	7,050,977,227	72.02 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	1,791,096,000	478,082,550	26.69 %
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	99,215,000	95,423,592	96.18 %
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0 %
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	7,900,000,000	6,477,471,085	81.99 %
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0 %
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0 %
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0 %
		8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0 %
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0 %
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0 %
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0 %
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0 %
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0 %
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0 %
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0 %
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0 %





PEMKAB.BADUNG

		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0 %
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0 %
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0 %
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0 %
		21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0 %
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0 %
		23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0 %
		24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0 %
		25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0 %
		26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0 %
		27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0 %
		28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0 %
		29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0 %
		30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0 %
		31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0 %
		32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0 %
		33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0 %
		JUMLAH INDIKATOR			9,790,311,000	7,050,977,227	72.02 %
		JUMLAH PROGRAM			9,790,311,000	7,050,977,227	72.02 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				12,991,555,000	11,180,856,938	86.06 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			12,991,555,000	11,180,856,938	86.06 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	697,290,000	505,791,588	72.54 %
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	294,265,000	271,822,350	92.37 %
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	12,000,000,000	10,403,243,000	86.69 %
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0 %
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0 %
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0 %
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0 %
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0 %
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0 %
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0 %
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0 %
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0 %
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0 %
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0 %



		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0 %
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	0	0	0 %
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0 %
		18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0 %
		19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0 %
		20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0 %
		21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0 %
		22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0 %
		24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0 %
		25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0 %
		26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0 %
		27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M ³ /Hari	0	0	0 %
		28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M ³ /Hari	0	0	0 %
		29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0 %
		30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0 %
		31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M ³ /Hari	0	0	0 %
		32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari	0	0	0 %
		33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0 %
		34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0 %
		35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0 %
		36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M ³ /Hari	0	0	0 %
		37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0 %
		38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	0	0	0 %
		39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	0	0	0 %
		40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0 %
		41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0 %
		JUMLAH INDIKATOR			12,991,555,000	11,180,856,938	86.06 %
		JUMLAH PROGRAM			12,991,555,000	11,180,856,938	86.06 %

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Badung, 2024

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Daerah yang ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.



Jenis pelayanan dasar pada bidang Perumahan Rakyat terdiri atas 2 (dua) jenis pelayanan dasar antara lain :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.
Merupakan penyediaan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan pada saat masa pasca bencana, surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota, dan/atau dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
Merupakan penyediaan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan program pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP, Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha, dan/atau pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses. Mutu Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat terdiri atas :

- 1. Mutu Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak huni bagi korban bencana meliputi :
 - a. Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan
Standar Jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - b. Kualitas Barang/Jasa
Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada penerima pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar yaitu :
 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - Pembangunan kembali rumah layak huni.
 - Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana
 - Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana.

4.4.2 Target Pencapaian

Tabel 4.19
Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, 2024

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.20
Realisasi Capaian Urusan Perumahan Rakyat

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
-----	---------------------------------------	-------------------------------	------------------



						(%)
	Pencapaian SPM					100.00%
1.	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	136	136	0	
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	12	12	0	100.00 %
	2 Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	24	24	0	100.00 %
	3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
	4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0	0	0	100.00 %
2.	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	0	0	0	100.00%
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%
	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		0	0	0	0.00 %

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, Tahun 2024

4.4.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.21
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat

Pendanaan	Pagu
APBD Kab.Badung	12,093,607,564,292
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	311,376,206,181



Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	3,956,602,541
APBD	3,956,602,541
a. APBD Murni	3,956,602,541
b. APBD DAU	0
c. APBD DAK Fisik	0
d. APBD DAK Non Fisik	0
e. Dana Bagi Hasil	0
f. Kerjasama	0
g. Otonomi Khusus	0
NON APBD	0
a. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	0
APBN	0
a. APBN-Dekonsentrasi	0
b. APBN-Tugas Pembantuan	0
Dana Lainnya	0
PERSENTASE ANGGRAN SPM TERHADAP ANGGRAN OPD	1,27%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, 2024

4.4.5 Dukungan Personil

Tabel 4.22

Dukungan Personil Pelaksanaan Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	
		PNS	Non PNS
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3	4
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	4

Sumber : Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, 2024

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.23

Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Permasalahan Penerapan SPM	Keterangan Masalah	Aksi
1.	Pengumpulan Data	Sumber data dasar berada di OPD lain sehingga harus menunggu untuk pengumpulan data.	Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait
2.	Penghitungan Kebutuhan	Belum adanya SOP penanganan pascabencana yang jelas antar OPD	Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dan



		sehingga perhitungan kebutuhan kegiatan menjadi kurang optimal	segera menyusun SOP penanganan bencana.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan dan penganggaran SPM telah terakomodir namun belum bisa optimal menyesuaikan kondisi PAD	Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan penerapan SPM
4.	Pelaksanaan	Belum adanya SOP penanganan pascabencana yang jelas antar OPD	Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dan segera menyusun SOP penanganan bencana
5.	Lain-Lain	-	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, 2024

4.4.7 Program dan Kegiatan

Tabel 4.24
Program dan Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAB. BADUNG				3,965,602,541	3,416,851,630	86.16 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				3,965,602,541	3,416,851,630	86.16 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			3,965,602,541	3,416,851,630	86.16 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	78,857,907	77,666,425	98.49 %
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	7,960,700	7,148,900	89.80 %
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	286,977,564	282,015,270	98.27 %
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	3,591,806,370	3,050,021,035	84.92 %
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi	Dokumen	0	0	0%



			Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	JUMLAH INDIKATOR				3,965,602,541	3,416,851,630	86.16 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			0	0	0%
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0%
	JUMLAH PROGRAM				3,965,602,541	3,416,851,630	86.16 %

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, 2024

4.5 URUSAN TRANTIBUMLINMAS

4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis – jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

- a. Jenis pelayanan dasar pada bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas 5 (lima) jenis pelayanan dasar antara lain Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
adalah pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang



berhak diperoleh setiap warga Negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana

c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana

pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

e. pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yg dilakukan dgn segera pada saat kejadian bencana utk menangani dan menyelamatkan korban bencana antara lain:

- pencarian dan pertolongan pada korban bencana; dan
- pemindahan korban bencana dari lokasi bencana ke tmpt yg aman dan/atau penampungan pertama utk mendpt tindakan penanganan lebih lanjut.

f. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Mutu Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebencanaan meliputi standar :

- a. Prosedur Operasional Penanggulangan Bencana
- b. Sarana prasarana penanggulangan bencana
- c. Peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia
- d. Pelayanan Warga Negara yang berada di Kawasan rawan bencana dan ymag menjadi korban bencana.

Mutu Pelayanan pada Sub Urusan Trantibum meliputi :

- a. Standar Operasional prosedur Satpol PP
- b. Standar Sarana Prasarana Satpol PP
- c. Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota perlindungan masyarakat
- d. Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran meliputi :

- a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi
- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
- c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
- d. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia



- e. Pelayanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran
- f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian

Tabel 4.25
Target Pencapaian SPM Urusan Trantibum

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibum		
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	100%
Kategori Indeks Pencapaian Spm Kebencanaan		
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	100%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)	100%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)	100%
Kategori Indeks Pencapaian Spm Damkar		
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)	100%

Sumber : Satpol PP Kab.Badung, BPBD Kab.Badung, Dinas Damkar Kab.Badung Tahun 2024

4.5.3 Realisasi

Tabel 4.26
Realisasi Capaian Urusan Trantibum

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian (%)
Pencapaian SPM						99.98%
Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibum						96.67%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum					96.67%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	2566	2566	0	100.00 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuh i	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	83.33%
	1 Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	36	36	0	100.00 %



PEMKAB. BADUNG

(jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)					
2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	7	7	0	100.00 %
3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	Orang	2279	2279	0	100.00 %
4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00 %
5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran	Orang	0	0	0	100.00%





PEMKAB.BADUNG

	Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)					
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	100.00%
Kategori Pencapaian SPM Kebencanaan						98.33%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)					95.00%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	150	150	0	100.00 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					15.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	75.00%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	46452	46452	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	150	150	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan	Unit	391	391	0	100.00 %





PEMKAB. BADUNG

	informasi publik KIE per jenis bencana					
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)					100.00 %
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	270	270	0	100.00 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	100%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	73	73	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	270	270	0	100.00 %
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)					100.00%
A.	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	190	190	0	100.00 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	100.00%
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas	Posko	12	12	0	100.00 %





PEMKAB. BADUNG

	penanganan darurat bencana)					
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	150	150	-102	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	12	12	0	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	40	42	-2	100.00 %
Kategori Pencapaian SPM Damkar						100.00%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)					100.00%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	170	360	-190	100.00 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	100.00%
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	360	360	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional	Dokumen	3	3	0	100.00 %





penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)					
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	11	11	0	100.00 %
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	449	449	0	100.00 %
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	1	1	0	100.00 %
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	1	1	0	100.00 %

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, Tahun 2024

4.5.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.27

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pendanaan	Pagu
APBD Kab.Badung	12.093.607.564.292
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	44.917.938.696
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	6.680.531.046
APBD	-
a. APBD Murni	44.917.938.696
b. APBD DAU	-
c. APBD DAK Fisik	-



d. APBD DAK Non Fisik	-
e. Dana Bagi Hasil	24.603.400
f. Kerjasama	-
g. Otonomi Khusus	-
NON APBD	-
a. <i>Corporate Social Responsibillity</i> (CSR)	-
APBN	-
a. APBN-Dekonsentrasi	-
b. APBN-Tugas Pembantuan	-
Dana Lainnya	-
PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	14,87%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Badung, 2024

Tabel 4.28
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bencana Daerah

Pendanaan	Pagu
APBD Kab.Badung	12.093.607.564.292
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	20.429.033.093
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	5.183.875.499
APBD	-
a. APBD Murni	5.183.875.499
b. APBD DAU	-
c. APBD DAK Fisik	-
d. APBD DAK Non Fisik	-
e. Dana Bagi Hasil	-
f. Kerjasama	-
g. Otonomi Khusus	-
NON APBD	-
a. <i>Corporate Social Responsibillity</i> (CSR)	-
APBN	-
a. APBN-Dekonsentrasi	-
b. APBN-Tugas Pembantuan	-
Dana Lainnya	-
PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHDAP ANGGARAN OPD	25,37%

Sumber : BPBD Kabupaten Badung, 2024

Tabel 4.29
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Kebakaran

Pendanaan	Pagu
APBD Kab.Badung	12.093.607.564.292
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	76.692.137.055
Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	23.381.793.835
APBD	-
a. APBD Murni	76.692.137.055
b. APBD DAU	-
c. APBD DAK Fisik	-
d. APBD DAK Non Fisik	-
e. Dana Bagi Hasil	-
f. Kerjasama	-
g. Otonomi Khusus	-





NON APBD	-
a. Corporate Social Responsibility (CSR)	-
APBN	-
a. APBN-Dekonsentrasi	-
b. APBN-Tugas Pembantuan	-
Dana Lainnya	-
PERSENTASE ANGGARAN SPM TERHADAP ANGGARAN OPD	30,48 %

Sumber : Damkar Kabupaten Badung, 2024

4.5.5 Dukungan Personil

Tabel 4.30

Dukungan Personil SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Trantibum	
		PNS	Non PNS
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	164	112

Sumber : Satpol PP Kabupaten Badung, 2024

Tabel 4.31

Dukungan Personil SPM Bencana Daerah

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Trantibum	
		PNS	Non PNS
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	8	4
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	8	4
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	10	53

Sumber : BPBD Kabupaten Badung, 2024

Tabel 4.32

Dukungan Personil SPM Kebakaran

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Trantibum	
		PNS	Non PNS
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	168	253

Sumber : Damkar Kabupaten Badung, 2024

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.33

Permasalahan dan Solusi SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Permasalahan Penerapan SPM	Keterangan Masalah	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Belum memiliki standarisasi	Perlu dilaksanakan pelatihan dan





		dan/atau kompetensi dalam pengumpulan data	penyusunan jasa konsultasi tentang mekanisme pengumpulan data
2.	Penghitungan Kebutuhan	Belum memiliki standarisasi dan/atau kompetensi dalam penghitungan kebutuhan data	Perlu dilaksanakan pelatihan dan penyusunan jasa konsultasi tentang mekanisme penghitungan kebutuhan
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Kesulitan dalam merencanakan dan menganggarkan dikarenakan pengumpulan data maupun penghitungan kebutuhan tidak berjalan sehingga mengakibatkan rancangan anggaran ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan penertiban tidak berjalan	Perlu dibuatkan studi (jasa konsultasi) tentang perhitungan dampak penertiban/penegakkan Perda dengan melibatkan stakeholder ataupun ahli dibidangnya masing-masing
4.	Pelaksanaan	Belum pernah melaksanakan	Perlu ditetapkan standarisasi dan peningkatan kompetensi petugas
5.	Lain-Lain	-	-

Sumber : Satpol PP Kabupaten Badung, 2024

Tabel 4.34
Permasalahan dan Solusi SPM Bencana Daerah

No	Permasalahan Penerapan SPM	Keterangan Masalah	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Kesulitan mendapatkan data <i>by name by addres</i>	Koordinasi dengan indtansi terkait data yang diperlukan
2.	Penghitungan Kebutuhan	Belum dipahami prosedur penyusunan kebutuhan anggaran untuk kegiatan pendukung SPM	Mengikuti Bimtek yang berkaitan penyusunan kebutuhan anggaran dan kegiatan SPM
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Kurangnya Basic Data yang valid dan Keterbatasan Anggaran	Melakukan Pendataan untuk Up Date Data dan Merancang anggran sesuai ketentuan penerapan SPM , Menyusun skala



			prioritas kegiatan pelayanan penanggulangan bencana sesuai standar pelayanan penanggulangan bencana
4.	Pelaksanaan	Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas	Menyelenggarakan peningkatan SDM melalui Sosialisasi dan Bimtek
5.	Lain-Lain		

Sumber : BPBD Kabupaten Badung, 2024

Tabel 4.35
Permasalahan dan Solusi SPM Kebakaran

No	Permasalahan Penerapan SPM	Keterangan Masalah	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Kesulitan mendapatkan data by name by adress karena alasan keamanan data pribadi penduduk yang harus dijaga	Pendekatan lebih intensif pada masyarakat untuk memastikan kerahasiaan data
2.	Penghitungan Kebutuhan	Keterbatasan ketersediaan data menyebabkan tidak bisa menghasilkan perhitungan kebutuhan secara tepat	Menggunakan data historis sebagai salah satu acuan perhitungan kebutuhan
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan dan penganggaran SPM telah terakomodir di DPA namun belum bisa optimal menyesuaikan kondisi PAD	Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran
4.	Pelaksanaan	Keadaan geografis Kabupaten Badung yang tidak mudah dijangkau saat terjadi kebakaran serta kemacetan lalu lintas yang menghambat sampai lokasi kebakaran	Mengoptimalkan tindakan preventif pada masyarakat
5.	Lain-Lain		

Sumber : Damkar Kabupaten Badung, 2024

4.5.7 Program dan Kegiatan

Tabel 4.36
Program dan Kegiatan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	PROGRAM/ KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAB. BADUNG				37,907,017,348	33,992,107,732	89.67 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				4,341,348,014	3,909,625,032	90.06 %



PEMKAB.BADUNG

	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		4,321,551,914	3,893,853,032	90.10 %	
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1,288,564,610	1,187,675,574	92.17 %
		2	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	36,164,100	4,899,400	13.55 %
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	121,150,300	0	0%
		4	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	9,133,200	5,627,548	61.62 %
		5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
		6	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		7	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
		8	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0%
		9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0%
		10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0%
		11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Orang	0	0	0%
		12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0%





PEMKAB.BADUNG

		13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%
		14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	2,829,978,304	2,690,353,962	95.07 %
		15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	36,561,400	36,561,400	14.49 %
		16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
		17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan	0	0	0%
		18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				4,321,551,914	3,893,853,032	90.10 %
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			19,796,100	15,772,000	79.67 %
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
		5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	0	0	0%





PEMKAB.BADUNG

	6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0%
	7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
	8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	8,590,700	5,908,000	68.77 %
	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	11,205,400	9,864,000	88.03 %
	12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				19,796,100	15,772,000	79.67 %
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			0	0	0%
	1	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0%
	2	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0%
	3	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0%
	4	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0%
	5	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				0	0	0%
JUMLAH PROGRAM				4,341,348,014	3,909,625,032	90.06 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)			5,183,875,499	4,255,460,675	82.09 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		211,310,780	162,828,500	77.06 %
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	19,071,171	0	0 %
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	192,239,609	162,828,500	84.70 %
JUMLAH INDIKATOR				211,310,780	162,828,500	77.06 %





PEMKAB.BADUNG

5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			439,062,496	297,780,900	67.82 %
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
	5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0%
	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	163,390,564	68,484,500	41.91 %
	7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	22,122,408	7,196,700	32.53 %
	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	3,692,262	3,470,100	93.98 %
	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0%
	13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0%
	14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0%
	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	249,857,262	218,629,600	87.50 %
	17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				439,062,496	297,780,900	67.82 %
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			4,321,713,434	3,652,086,835	84.51 %
	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	1,894,659	1,505,100	79.44 %
	2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	3,495,541,877	3,224,410,860	92.24 %





PEMKAB.BADUNG

		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	683,903,745	347,273,900	50.78 %
		4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	137,611,029	77,853,875	56.58 %
		7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
		8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	2,762,124	1,043,100	37.76 %
	JUMLAH INDIKATOR				4,321,713,434	3,652,086,835	84.51 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			211,788,789	142,764,440	67.41 %
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1,989,231	1,001,500	50.35 %
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	29,239,731	27,640,600	94.53 %
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	55,772,619	1,003,000	1.80 %
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	124,787,208	113,119,340	90.65 %
		11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0%





PEMKAB.BADUNG

		12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0%
		13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				211,788,789	142,764,440	67.41 %
	JUMLAH PROGRAM				5,183,875,499	4,255,460,675	82.09 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				28,381,793,835	25,827,022,025	91.00 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			24,293,076,235	22,849,427,325	94.06 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	204,750,000	160,664,200	78.47 %
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12,846,330,435	12,356,929,203	96.19 %
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	64,314,600	47,244,375	73.46 %
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2,269,200	829,000	829,000
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	1,646,739,600	1,260,023,387	76.52 %
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	114,874,800	112,683,660	98.09 %
		8	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
		9	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Laporan	0	0	0%
		10	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0%
		11	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		12	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan	Dokumen	0	0	0%





PEMKAB. BADUNG

			Kebakaran dan Penyelamatan				
		13	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0%
		14	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	9,181,775,000	8,686,222,500	94.60 %
		15	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	1,188,400	0	0%
		16	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	230,834,200	224,831,000	97.40 %
		JUMLAH INDIKATOR			24,293,076,235	22,849,427,325	94.06 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	5,642,100	5,069,100	89.84 %
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	317,233,200	279,129,500	87.99 %
		JUMLAH INDIKATOR			322,875,300	284,198,600	88.02 %
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran			6,155,800	2,761,600	44.86 %
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	6,155,800	2,761,600	44.86 %
		JUMLAH INDIKATOR			6,155,800	2,761,600	44.86 %
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			1,447,059,000	626,260,000	43.28 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	63,135,600	61,557,500	97.50 %
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	1,383,923,400	564,702,500	40.80 %
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
		JUMLAH INDIKATOR			1,447,059,000	626,260,000	43.28 %
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			2,312,627,500	2,064,374,500	89.27 %
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan,	Laporan	2,833,500	1,265,500	44.66 %





			dan/atau mengancam keselamatan manusia				
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	2,309,794,000	2,063,109,000	89.32 %
	JUMLAH INDIKATOR				2,312,627,500	2,064,374,500	89.27 %
	JUMLAH PROGRAM				28,381,793,835	25,827,022,025	91.00 %

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, Tahun 2024

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis – jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

Jenis pelayanan dasar pada Bidang Sosial terdiri atas 5 (lima) jenis pelayanan dasar antara lain :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Penerima pelayanan dasar SPM Sosial bagi Disabilitas Terlantar di Luar Panti merupakan Penyandang Disabilitas yang :
 - tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
 - masih ada perseorangan, keluarga,dan/atau masyarakat yang mengurus.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
Penerima pelayanan dasar SPM Sosial bagi Anak Terlantar di Luar Panti merupakan Anak yang :
 - 1) tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus,
 - 2) masih ada perseorangan, keluarga,dan/atau masyarakat yang mengurus.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
Penerima pelayanan dasar SPM Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti merupakan Lanjut Usia yang :
 - 1) tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
 - 2) masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.





d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Penerima pelayanan dasar SPM Sosial bagi Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti merupakan Gelandangan dan Pengemis yang :

- 1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (Sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- 2) tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
- 3) tidak memiliki tempat tinggal tetap.
- 4) masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Penerima pelayanan dasar SPM Sosial bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota persatu kali kejadian bencana dengan kriteria :

- jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang.
- dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah di Kabupaten Badung; dan/atau.
- adanya surat penetapan bencana dari Bupati Badung.

Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial meliputi:

- a. Standar dan Jumlah Kualitas Barang dan/Jasa
- b. Standar dan Jumlah kualitas sumber daya manusia
- c. Petunjuk teknis atau cara pemenuhan Standar

4.6.2 Target Pencapaian

Tabel 4.39
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Target
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Badung, 2024

4.6.3 Realisasi



Tabel 4.40
Realisasi Capaian Urusan Sosial

No .	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian (%)
	Pencapaian SPM					65.73%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					98.46%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	1062	1062	0	100.00%
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					18.46%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	92.31%
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	12	12	0	100.00 %
	2 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	500	500	0	100.00 %
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	50	50	0	100.00 %
	4 .Penyediaan sandang (berupa pembelian		0	0	0	100.00 %



PEMKAB. BADUNG

pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang				
5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	50	50	0	100.00 %
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50	50	0	100.00 %
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbo und/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	500	500	0	100.00 %
8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	500	500	0	100.00 %





PEMKAB. BADUNG

	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	12	12	0	100.00 %
	10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	50	50	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	550	550	0	100.00 %
	12 . emberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	500	500	0	100.00 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					98.33%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang harus dilayani	Orang	94	94	0	100.00 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					18.33%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	91.67%
	1 Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang	Orang	94	94	0	100.00 %





PEMKAB.BADUNG

	disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	61	61	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	150	150	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	0	0	0	0.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	150	150	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbo und/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	150	150	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial	Orang	61	61	0	100.00 %





PEMKAB.BADUNG

	kepada keluarga anak terlantar					
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	8	8	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	211	211	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	8	8	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	8	8	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	8	8	0	100.00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					96.92 %
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	6323	6323	0	100.00 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					16.92%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	84.62%
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh	Orang	6323	6323	0	100.00 %





PEMKAB. BADUNG

masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					
2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanter)	Orang	23	23	0	100.00 %
3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	226	226	0	100.00 %
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	6323	6323	0	100.00 %
5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	22	22	0	100.00 %
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	226	226	0	100.00 %
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbo und/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	23	23	0	100.00 %





PEMKAB.BADUNG

	(seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	23	23	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	23	23	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0	0	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	0	0	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	23	23	0	100.00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (Kab.Badung tidak ada Rehabilitasi sosial dasar khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti)					34.96%





PEMKAB. BADUNG

A	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	28.93 %
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	600	217	383	36.17%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					6.03%
B	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	30.14%
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	600	217	383	36.17%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	600	217	383	36.17 %
	3 . Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	600	217	383	36.17 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	0	0	0	0.00 %





PEMKAB.BADUNG

5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	600	217	383	36.17 %
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang	600	217	383	36.17 %
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan didesa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	600	217	383	36.17%
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	0	0.00 %
9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	600	217	383	36.17 %
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	600	217	383	36.17 %
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau	Orang	600	217	383	36.17 %





	pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	600	217	383	36.17 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					0.00%
A.	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	55	0	55	100.00 %
B.	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					0.00%
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	0.00%
	1 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0	0	0	0.00 %

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, Tahun 2024

4.6.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.41
Alokasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

No	Pendanaan	Pagu
1.	APBD Kab.Badung	12,093,564,292
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	23,876,353,281
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	23,876,353,281
	APBD	23,876,353,281
	v. APBD Murni	23,876,353,281
	w. APBD DAU	0
	x. APBD DAK Fisik	0
	y. APBD DAK Non Fisik	0
	z. Dana Bagi Hasil	0
	aa. Kerjasama	0
	bb. Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	15. Corporate Social Responsibillity (CSR)	0
	APBN	0



	g. APBN-Dekonsentrasi	0
	h. APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0
	a. Dana Insentif Fiskal (DIF)	100.00%

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, Tahun 2024

4.6.5 Dukungan Personil

Tabel 4.42
Dukungan Personil Pelaksanaan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	
		PNS	Non PNS
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	3	3
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	3	3
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	3	3
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	3	6
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3	3

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Badung, 2024

4.6.7 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.43
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

No	Permasalahan Penerapan SPM	Keterangan Masalah	Aksi
1.	Pengumpulan Data	Dalam hal pengumpulan data, pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Badung. Namun yang menjadi permasalahan adalah data yang kami miliki bukan orang terlantar melainkan warga yang mengalami kemiskinan dan atau rentan miskin. Warga terlantar, gepeng dan pengemis yang ditangani oleh Dinas Sosial Kab. Badung selama ini adalah warga dari luar Kab. Badung.	Solusi atau aksi yang akan kami lakukan kedepannya adalah menyusun suatu regulasi yang menyatakan bahwa di Kabupaten Badung Tidak ada Keterlantaran
2.	Penghitungan Kebutuhan	Karena tidak ada keterlantaran perhitungan kebutuhan dilakukan untuk warga atau Masyarakat miskin dan atau rentan miskin	Solusi atau aksi yang akan kami lakukan kedepannya adalah menyusun suatu regulasi yang menyatakan bahwa di



			Kabupaten Badung Tidak ada Keterlantaran
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan dan Penganggaran yang dilaksanakan selama ini diperuntukan untuk Masyarakat miskin dan atau rentan miskin. Gelandangan pengemis yang bukan Masyarakat Kab. Badung. Jadinya Kejelasan kinerja kami Dinas Sosial dalam menanggapi SPM kurang jelas kalau dikaitkan atau menjawab tiap indikator dari pelaksanaan SPM	Solusi atau aksi yang akan kami lakukan kedepannya adalah menyusun suatu regulasi yang menyatakan bahwa di Kabupaten Badung Tidak ada Keterlantaran
4.	Pelaksanaan	Permasalahan dalam pelaksanaan SPM yang kami alami sebenarnya ada pada tidak dimilikinya data keterlantaran di Kab. Badung.	Solusi atau aksi yang akan kami lakukan kedepannya adalah menyusun suatu regulasi yang menyatakan bahwa di Kabupaten Badung Tidak ada Keterlantaran
5.	Lain-Lain		

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Badung, 2024

4.7.7 Program dan Kegiatan

Tabel 4.44
Program dan Kegiatan SPM Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM/KEGIATAN		SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KAB. BADUNG				750,324,042	1,097,035,798	70,14%
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				750,324,042	966,882,898	78,15%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			619,347,794	966,882,898	78,15%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	258,849,659	252,564,418	97,57%
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	325,004,374	324,239,252	99,76%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	0	0	0%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	650,255,447	388,051,628	59,68%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	3,055,097	2,027,600	66,37%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%



PEMKAB.BADUNG

		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,237,164,577	966,882,898	78,15%
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				171,917,707	0	0%
		1	Penyediaan makanan	Orang	171,917,707	0	0%
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	155,034,961	130,152,900	83,95%
	JUMLAH INDIKATOR				326,952,668	130,152,900	39,81%
	JUMLAH PROGRAM				1,564,117,245	1,097,035,798	70,14%
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						

Sumber : Dinas Sosial Kab.Badung Ta. 2024